

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel terhadap pengaruh Pembiayaan, dana Pihak Ketiga (DPK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2022–2024, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pembiayaan pada BPRS pada tahun 2022-2024

Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel pembiayaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan oleh $t_{table} < t_{hitung}$ sebesar $0.85 < 2.020$. Sedangkan Pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai probabilitas sebesar $0.39 > 0.05$.

2. Variabel DPK pada BPRS pada tahun 2022-2024

Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Hal ini dibuktikan t_{tabel} dengan t_{hitung} , variabel DPK pada BPRS sebesar $-209 < 2020$. Sedangkan dengan membandingkan nilai probabilitas sebesar $0.036 < 0.05$. Artinya, meskipun penghimpunan dana masyarakat oleh BPRS meningkat, dana tersebut tidak sepenuhnya tersalurkan secara produktif sehingga belum mampu mendorong aktivitas

ekonomi daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Sari & Suparno, 2024) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki nilai signifikan sebesar $0.054 > 0,05$, maka variabel X_3 berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah
4. Pembiayaan, DPK, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Jawa Tengah dengan nilai F hitung $10.17 < 2.83$ dengan nilai signifikansi sebesar $0.0172 < 0.05$.

B. Implikasi

1. Karena pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka BPRS diharapkan dapat lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Penyaluran pembiayaan sebaiknya diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian daerah, bukan hanya sekadar menambah portofolio kredit. Selain itu, perlu adanya evaluasi terhadap strategi pembiayaan agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa

meskipun dana masyarakat yang dihimpun meningkat, penyalurannya belum sepenuhnya maksimal dan tepat sasaran. Oleh karena itu, BPRS perlu mengoptimalkan manajemen likuiditas serta memperluas penyaluran dana ke sektor produktif, seperti sektor UMKM yang terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi riil. Dengan pengelolaan yang lebih baik, penghimpunan dana masyarakat dapat benar-benar memberi dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.

3. Karena variabel TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan BPRS dalam merancang program pembiayaan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Program-program tersebut dapat berupa pembiayaan berbasis komunitas, koperasi, maupun usaha padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Dengan cara ini, pembiayaan yang disalurkan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat membantu menekan angka pengangguran di daerah.
4. Pembiayaan, DPK, dan TPT terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPRS tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi, melainkan membutuhkan sinergi antara penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan kondisi ketenagakerjaan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara

BPRS dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan yang diarahkan pada sektor-sektor produktif. Dengan sinergi tersebut, diharapkan BPRS mampu memberikan kontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, periode pengamatan yang digunakan hanya mencakup dua tahun, yaitu 2022–2024, sehingga belum mampu menangkap pengaruh jangka panjang dari pembiayaan, Dana Pihak Ketiga, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap PAD. Kedua, keterbatasan data dari BPRS di beberapa daerah mengharuskan penyesuaian dan transformasi data agar dapat diolah secara panel, yang berpotensi memengaruhi akurasi hasil. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, padahal terdapat banyak faktor lain yang juga memengaruhi PAD seperti belanja daerah, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan struktur ekonomi daerah. Keempat, pendekatan regresi linier panel yang digunakan mengasumsikan hubungan yang bersifat linier dan langsung, padahal dalam kenyataan, hubungan antara variabel-variabel tersebut bisa saja bersifat nonlinier atau memiliki efek tertunda.